

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pendidikan

Pendidikan menurut Paulo Freire harus berorientasi untuk membebaskan manusia dari kungkungan rasa takut dan tertekan akibat otoritas kekuasaan (penindasan).¹ Konsep yang ditawarkan oleh Freire ini, secara ideal mestinya mampu menjadi solusi atas bentuk-bentuk ketimpangan sistem pendidikan kita, baik secara teoritik maupun praktik di lapangan.

Pendidikan pada hakikatnya merupakan proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Ini menunjukkan bahwa manusia akan menjadi manusia karena pendidikan, atau dengan kata lain bahwa pendidikan berfungsi untuk memanusiakan manusia.² Disadari atau tidak fungsi pendidikan dalam konteks ini, yakni memanusiakan manusia merupakan pondasi dasar dalam pelaksanaan pendidikan. Dalam hal ini, secara kritis perlu ditela'ah bersama bahwa pelaksanaan pendidikan kita sampai detik ini masih jauh dari apa yang dicitakan dari idealitas fungsi pendidikan itu sendiri.

Meski demikian, pendidikan juga masih dianggap sebagai kekuatan utama dalam komunitas sosial untuk mengimbangi laju berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi.³ Pengembangan eksistensi pendidikan menuntut sistem pendidikan yang lebih dinamis dan lebih responsif terhadap berbagai persoalan dan perubahan dalam dunia pendidikan.

Beragam upaya terus dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan (Kemendiknas) untuk mengembangkan bentuk dan sistem pendidikan, perubahan yang dilakukan mulai dari pergantian sistem pendidikan, sampai pada pengembangan-pengembangan model sekolah. Meski demikian, konsep yang diterapkan tersebut, output yang dihasilkan masih belum mampu mendongkrak sumber daya manusia Indonesia yang unggul.

Mengacu pada UU RI No. 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS, bab I pasal 1 dijelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Akan tetapi selama ini yang terjadi adalah betapa proses pendidikan selalu tidak sejalan dengan kenyataan yang di hadapi oleh siswa maupun anak didik. Padahal proses pendidikan sesungguhnya dijalankan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan akan sumber daya manusia yang (minimal) sanggup menyelesaikan persoalan lokal yang melingkupinya. Dalam artian, setiap proses seharusnya mengandung berbagai bentuk pelajaran dengan muatan lokal yang signifikan dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga output pendidikan adalah manusia yang sanggup memetakan sekaligus memecahkan masalah yang sedang dihadapi masyarakat.

Mangun Wijaya, mengatakan bahwa pendidikan dan pengajaran di dalam paradigma neokolonial Indonesia saat ini hanya diajukan demi fungsi terhadap kebutuhan penguasa, tidak demi masyarakat.⁵ Sehingga setiap pengambilan keputusan selalu harus menunggu datang dari penguasa, masyarakat tidak pernah menjadi pemikir yang kreatif dan terampil untuk setiap saat mengadakan penyesuaian dalam pelbagai alternatif yang mungkin.

Meminjam istilah Azyumardi Azra, terjadi semacam situasi anomali atau bahkan krisis identitas ideologis.⁶ Padahal sistem pendidikan di Indonesia sudah memiliki ideologi pendidikan sendiri yaitu Pancasila. Namun implementasinya dalam penyelenggaraan pendidikan, walaupun sudah ada Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, masih belum jelas arahnya. Terbukti masih banyak mengadopsi strategi dari ideologi pendidikan lain. Dengan pertimbangan

menghadapi globalisasi memanfaatkan strategi orang lain sah-sah saja, dengan maksud untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional yang saat ini tertinggal dari negara-negara lain selama strategi itu tidak menggoyahkan ideologi sendiri.

Hasil investigasi dari beberapa lembaga internasional yang menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia memiliki kualitas yang masih sangat rendah. Penyebab rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia ini, menurut penelitian Darmaningtyas, karena pendidikan (hanya) dijadikan alat untuk melanggengkan kekuasaan dan mendukung ideologi militeristik. Karena itulah menurut H. A. Tilaar, pendidikan yang dikembangkan orde baru tidak mungkin dapat melahirkan generasi yang ideal. Sebaliknya melalui pendidikan seseorang malah masuk perangkap setan, anak kehilangan kejujuran, tipisnya rasa kemanusiaan, kurangnya jiwa makarya, hilangnya pribadi yang mandiri dan rendahnya disiplin diri.

Strategi pembangunan yang mengadopsi barat dan meletakkan model kapitalisme sebagai kiblat yang harus ditiru telah memberikan implikasi terciptanya masyarakat yang hedonistik, individualistik dan materialistik.

Padahal tujuan pendidikan yang diharapkan tidak seperti itu, sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, Bab II Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Di sisi lain, dalam pasal 31 UUD 1945 ayat (1) disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Dalam ayat (4) juga disebutkan bahwa negara

memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta dari Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.⁸ Meski 20% APBN sudah ditetapkan untuk pendidikan tapi pelaksanaan di lapangan masih jauh dari yang diharapkan dari peningkatan mutu kualitas pendidikan kita.

Tetapi pada kenyataannya pendidikan nasional untuk saat ini sepertinya semakin jauh dari visi kerakyatan. Bahkan dengan gerakan otonomi sekolah, sekolah tinggi semakin jelas menunjukkan gejala kapitalisme pendidikan. Saat ini pendidikan dikelola dengan menggunakan manajemen bisnis yang kemudian menghasilkan biaya yang melangit. Biaya pendidikan makin mahal, bahkan terkesan telah menjadi komoditas bisnis bagi kaum pemilik modal (kapitalis).

Dengan menggunakan label "sekolah unggulan", "sekolah favorit", sekolah panutan dan sebagainya biaya pendidikan semakin mencekik "wong cilik". Pendidikan kita semakin menindas terhadap kaum marginal. Rakyat lemah tidak lagi mampu mengenyam pendidikan bermutu akibat mahal-nya biaya pendidikan itu.

Pengembangan model label sekolah yang diterapkan oleh pemerintah saat ini, secara tegas telah menggambarkan bentuk masyarakat berkelas. Fakta ini begitu ironis, karena sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas sangat dibutuhkan untuk memulihkan keadaan Negara di segala sektor yang sedang mengalami krisis. Dewasa ini model sekolah yang berlabel mulai banyak menghiasi di setiap daerah-daerah di Indonesia, konsep yang ditawarkan tentu mutu, baik dari pendidik, sarana dan prasarana, maupun ekstrakurikuler yang dipoles dengan semenarik mungkin. Namun dibalik itu, komoditas pendidikan menjadi hal yang tidak bisa ditawar kembali dalam dunia pendidikan. Sehingga hal yang semestinya menjadi peran pendidikan yakni mengoptimalkan potensi yang ada dalam individu peserta didik terabaikan dengan sendirinya.

Seorang pemikir Islam Al-Jundi, sebagaimana dikutip Mohammad Arkoun mengatakan, manusia bebas atau kebebasan manusia merupakan satu diantara cirri khas Islam, karena Islam adalah agama yang pertama kali menganjurkan kebebasan manusia.⁹ Menurut Islam kebebasan merupakan sikap dasar manusia dan salah satu wujud jati diri manusia yang sebenarnya jika dibandingkan dengan makhluk lain. Jati diri inilah yang manusia seutuhnya, berkarakter dan mandiri. Sebenarnya untuk mewujudkan fungsi dari pendidikan, pendidikan harus berusaha mengembangkan potensi yang telah ada pada diri manusia, yang dibawanya sejak menghirup udara kehidupan di dunia ini, agar manusia benar-benar menjadi manusia. Sebab tanpa adanya usaha stimulatif yang bersifat eksternal terhadap perkembangan potensi tersebut, manusia sulit dan jauh untuk menjadi manusia yang sempurna.

Mengacu pada realitas pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang diterapkan di sekolah, banyak kita jumpai konsep sekolah yang diterapkan begitu mengungkung bagi peserta didik, mulai desain suguhan kurikulum yang diterapkan sampai pada pola penyampaian mata pelajaran yang disuguhkan tanpa memberikan kebebasan bagi peserta didik untuk mengkritisi apa yang telah disampaikan. Sehingga pencerabutan nilai-nilai kebebasan dalam konteks pengayaan intelektual sedikit-banyak terhambat.

Dari latar belakang yang di atas, penulis mencoba untuk melakukan kajian penelitian dengan judul “Pelaksanaan Pendidikan Di SD Muhammadiyah 16 Surabaya (Studi Relevansi Dengan Konsep Pendidikan Paulo Freire).